

**PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA
TENTANG ISLAM DAN DEMOKRASI DALAM
DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Doktor dalam
Bidang Ilmu Agama Islam



Oleh :

EFRINALDI

NIM. 99.3.00.1.01.01.0196

PROMOTOR

Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Dr. Bahtiar Effendy

**PROGRAM PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2006**

Disertasi

Disertasi ini telah diujikan
pada sidang ujian disertasi pendahuluan
Selasa, 3 Oktober 2006 M/10 Ramadhan 1427 H.

Promotor

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Dr. Bahtiar Effendy

Tim Penguji

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
Dr. Bahtiar Effendy
Prof. Dr. Badri Yatim, MA
Dr. Fuad Jabali
Dr. Saiful Mujani

Disertasi ini dipertahankan pada Ujian Promosi Doktor
Senin, 4 Desember 2006 M/ 13 Dzulqa'idah 1427 H

Tim Penguji

Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Promotor)
Dr. Bahtiar Effendy (Promotor)
Prof. Dr. Badri Yatim, MA (Penguji)
Dr. Fuad Jabali (Penguji)
Dr. Saiful Mujani (Penguji)
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Direktur Pascasarjana)
Prof. Dr. Suwito, MA (Sekretaris Senat UIN)
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Efrinaldi

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Sabar, 19 Juli 1974

NIM : 99.3.00.1.01.01.0196

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang

Alamat : Jl. Jhony Anwar Gg. II No. 8 / B Ulak Karang, Padang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "*Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*" adalah karya penulis sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 10 Nopember 2006

Yang membuat pernyataan



Efrinaldi
EFRINALDI, M.Ag.

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul "*Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh Efrinaldi, Nomor Pokok 99.3.00.1.01.01.0196 telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penguji dalam sidang ujian disertasi terbuka (promosi doktor) pada tanggal 4 Desember 2006.

Jakarta, 6 Desember 2006

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Komaruddin Hidayat
NIP. 150 210 423

PERSETUJUAN

Disertasi yang berjudul "*Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh Sdr.Efrinaldi, Nomor Pokok 99.3.00.1.01.01.0196 disetujui untuk dibawa ke sidang ujian disertasi terbuka (promosi doktor).

Promotor,



Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Tanggal: 15-11-2006

Promotor,



Dr. Bahtiar Effendy

Tanggal: 20-11-2006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Disertasi yang berjudul "*Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh Sdr.Efrinaldi, Nomor Pokok 99.3.00.1.01.01.0196 disetujui untuk dibawa ke sidang ujian tertutup.

Pembimbing,



Prof. Dr. Masykuri Abdillah

Tanggal: 21-06-2006

Pembimbing,



Dr. Bahtiar Effendy

Tanggal: 24-07-2006

PERSETUJUAN TIM PENGUJI DISERTASI

Disertasi yang berjudul "*Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*" yang ditulis oleh Sdr.Efrinaldi, Nomor Pokok 99.3.00.1.01.01.0196 telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penguji dalam sidang ujian disertasi pendahuluan tanggal 3 Oktober 2006, dan disetujui untuk dibawa ke sidang ujian disertasi terbuka (promosi doktor).

Jakarta, November 2006

Ketua Sidang,



Dr. Fuad Jabali

Tim Penguji:

Prof.Dr.Masykuri Abdillah

Dr. Bahtiar Effendy

Prof. Dr. Badri Yatim, MA

Dr. Fuad Jabali

Dr. Saiful Mujani



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang *Pemikiran Mohammad Hatta tentang Islam dan Demokrasi dalam Dinamika Politik di Indonesia*. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab: 1) bagaimana pemikiran Hatta tentang demokrasi dalam hubungannya dengan dinamisasi Islam di Indonesia, serta sejauhmana keselarasan pemikiran Hatta tentang Islam dalam penegakan nilai-nilai demokrasi tersebut; 2) bagaimana seharusnya politik Indonesia versi Hatta dalam kaitannya dengan Islam dan paham kebangsaan dalam dinamika demokrasi dan pluralisme politik di Indonesia.

Untuk membahas permasalahan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian sejarah, yang sumber-sumber data ditelaah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang diklasifikasikan kepada jenis data, yang meliputi data primer berupa karya-karya Hatta yang relevan dengan topik yang dibahas, dan data sekunder dari tulisan-tulisan cendekiawan lain tentang Hatta. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dokumenter digunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yang kemudian setelah data itu dikumpulkan dilakukan pengolahan data melalui analisis data (*contents analysis*), dan dengan menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan penelitian penulis, dapat dikemukakan bahwa perhatian Hatta begitu intens tentang penegakan demokrasi di atas persada tanah air. Menurut Hatta, perkembangan ide demokrasi di Indonesia bersumber pada tiga hal. *Pertama*, paham demokrasi Barat yang mengandung dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan, persaudaraan, dan persamaan, yang memberi inspirasi bagi pergerakan nasional dalam menentang imperialisme di nusantara. *Kedua*, ajaran Islam yang membela kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat. Dalam syari'at Islam terlihat betapa urgennya nilai-nilai persaudaraan, keadilan, kebenaran, kebebasan, dan persamaan (*equality before the law*), yang mesti disosialisasikan dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita Islam. Hatta menyatakan bahwa Islam merupakan salah satu pilar kebudayaan bangsa dan sebagai "pelita yang sebaik-baiknya untuk menyulahi jalan rakyat ke dalam persaudaraan dan tolong-menolong."

Islam memperkuat demokrasi dengan membawakan argumentasinya sendiri. Dalam *siyasah syar'iyah* dikenal adanya konsep-konsep musyawarah (perundingan), *al-hurriyah* (kebebasan), *amanah* (*accountability*) dan *musawah* (kesetaraan) yang jika diinterpretasikan secara *inherent* sudah mengandung unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Dalam hal ini, relevansi cita-cita demokrasi Hatta dengan agama yang dipeluknya mencuat. Islam dan demokrasi pada esensinya *compatible* dan dapat *viable*.

Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme, yang tercermin dari masyarakat desa, berupa gotong-royong dan asas kekeluargaan. Demokrasi dalam masyarakat pedesaan tampak warga hidup dengan tolong-menolong, rapat/musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan, kebebasan untuk menolak (*dessent*) dan menentang kebijakan pimpinan dalam rapat desa, yang pada dasarnya merupakan masyarakat kolektifis.

Hatta tampak sebagai seorang demokrat dan pejuang penegakan hak-hak asasi manusia. Pemikiran tentang pentingnya muatan hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan lainnya diperjuangkan Hatta secara serius untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945, seperti tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945. Konsep mengenai *welfare policy* dan kebijakan *affirmative action* dirumuskan pula dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan dasar pelaksanaan keadilan sosial, yang sesuai dengan Islam, yang menghendaki agar masyarakat melaksanakan keadilan dan kemakmuran.

Dalam dinamika politik di Indonesia, Hatta tampak sebagai seorang tokoh nasionalis sekuler. Pengidentifikasian para tokoh politik Indonesia menjadi nasionalis sekuler dan kelompok Islam, antara lain, bertolak dari ciri partai tempat tokoh tersebut aktif dan berjuang dalam pergerakan kebangsaan. Dalam konteks ini, Hatta aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan PNI-Baru, yang bercorak nasionalisme. Meski dalam politik ia dikategorikan sebagai seorang nasionalis, namun sikap religius dan nafas budaya tampak mencuat dalam berbagai pemikirannya. Dalam keyakinan Hatta, nasionalisme yang disikapinya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Buktinya, bahwa ia adalah seorang Muslim yang taat dan sekaligus berpaham kebangsaan.

Hatta terlihat sebagai pribadi yang unik dan menarik. Hatta memandang Islam dalam hubungan dengan negara secara substantif, bukan simbolik. Dalam pandangan Hatta sejak dari dulu, bagi negara yang warga negaranya plural dan heterogen, penganut agamanya berbeda-beda, maka negara mesti didirikan di atas persatuan dan kesatuan nasional, dan mesti dengan dasar "demokrasi", yakni dengan maksud mengayomi dan melindungi keselamatan seluruh rakyatnya, seperti pendapatnya mengenai pertentangan dalam masyarakat India pada tahun 1931.

Demi persatuan dan kesatuan bangsa pula, resolusi konflik ideologis diretas oleh Hatta, tatkala perdebatan kelompok Islam politik dengan kalangan nasionalis bergulir terus pada Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*), yang kemudian tujuh patah kata dalam sila pertamanya dihapus, yakni: *dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam perkembangannya, Hatta dipandang sangat berjasa dalam upaya meng-"Islamisasi" Pancasila, sehingga dasar negara ini dapat diterima oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus selalu disinari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan orang Islam, Esa tersebut menunjukkan dengan makna *tauhid*.

Meski demikian, perdebatan panjang yang bersifat ideologis-politis terus bergulir, seperti terlihat pada Majelis Konstituante pada tahun 1950-an. Perdebatan demokratis antara pendukung aliran ideologi Islam dan Pancasila menjadi terhenti dengan keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berujung dengan diterapkan Demokrasi Terpimpin-nya pemerintahan Soekarno (1959-1965). Pada era Demokrasi Terpimpin, Hatta memang sangat kritis, karena baginya demokrasi tidak dapat dipaksakan dari atas. Naskah *Demokrasi Kita*, yang digagas Hatta tahun 1960, bahkan pernah dilarang terbit.

Pada tahun 1967 Hatta bermaksud mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Dalam pemikiran Hatta, keinginannya untuk mendirikan PDII adalah faktor sejarah, yang dalam perkembangannya tidak jadi berdiri, karena tidak diizinkan pemerintah Orde Baru.

Dalam hidupnya Hatta selalu berupaya untuk menegakkan demokrasi di tanah air. Cita-cita dengan semangat demokratis yang menjadi pedoman bukan hanya kemerdekaan bangsa, tetapi suatu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera.

ABSTRACT

This dissertation deals with “Mohammad Hatta’s Thought of Islam and Democracy in the Political Dynamics of Indonesia”. This research is focused to find out: 1) Hatta’s view of democracy in relation to the dynamics of Islam in Indonesia, and the extent of his harmonized Islamic ideas in upholding the values of such democracy; 2) his thought of Indonesian politics in relation to the Islamic ideas and the nationalism in the dynamics of democracy and political pluralism in Indonesia.

This study applies historical research method in which the sources are examined through a library research to classify into type of data including the primary one that includes Hatta’s works relevant with the topic, and the secondary one that includes others’ articles on Hatta. Accurate and documentary data are obtained using library research technique after which the data is collected and contents analysis is done using descriptive analysis and comparative method.

To the writer’s exploration, it can be said that Hatta’s interest is so fixed on the upholding of people’s sovereignty in the country or “democracy”, as a principle of governance of motherland. Hatta would say that the development of Indonesian democracy is rooted on three parts. *First*, the Western democracy that encompasses and honors human rights principles, liberalism, fraternity, which had inspired national movement against imperialism. *Second*, the Islamic credo to stand up for God’s truth and justice in the community. In Islam it is evident how crucial the human rights, equality before the law, brotherhood, and fairness are, which must be socialized to the community along the lines of the ideals of Islam. Hatta asserted that Islam was just one pillar of national philosophy and “the brightest light to guide people into kinship and helping hand environs.”

Islam supports democracy by carrying its own arguments. In *siyasaḥ syar’iyyah* there are known concepts of *shura* (consultation), *hurriyah* (liberalism), *amanah* (accountability), *musawa* (egalitarianism), and *mushawara* (resolution) that not only do they fit the democracy but when are interpreted in inherent way they stand for democracy itself. In this case, the relevance of Hatta’s ideal of democracy with religion he follows is prominent. Islam and democracy, in essence, are compatible and viable.

Third, the wisdom that Indonesians maintain collectivism, which is reflected in the suburb and rural community in the form of helping hand and kinship. Democracy in the native Indonesians, which basically are collectivist society, is based on the common ownership of land and production tools.

Hatta appeared as a democrat as well as warrior of people’s sovereignty. The idea of the importance of human rights content was seriously defended to be included in the Constitution of 1945 (UUD 1945), as what is revealed now in its Article 28. The concepts of *welfare policy* and *affirmative action* are also contended in Article 33 and 34 of the Constitution of 1945. This is the basis to practice the social justice, which fits Islam, that urges the people exercise fairness and welfare. That is what he meant by the socialism in Indonesia, which is a religious socialism.

In the political dynamics of Indonesia, many historians place him as a secular nationalism figure, which often must face the formal Islamic political groups. The identification of Indonesian political figures into Islamic and secular nationalists start, among others, from the kind of party in which they contribute and play role in the national movements. In this context, Hatta was an active member of Perhimpunan Indonesia and PNI-Baru, with their nationalism features. Although he is a nationalist in politics, yet his religiousness and deep consideration of local culture are so prominent in many of his thoughts. He believed that the nationalism he embraced was not against Islam. It is proved that he was a devout Muslim as well as one with nationalism idea.

Hatta appeared as a unique and interesting character. He perceived Islam in relation with the state in a substantial manner rather than symbolic. In his original point of view, to a state whose people are plural and heterogeneous with different faiths, it must be established upon oneness and unity based on “democracy,” which means to serve and protect the wellbeing of all, as what he said about the conflict of the people in India in 1931.

Also for the national oneness and unity, he had resolved the ideological conflict when argument between the political Islamic group and nationalists drawn out during the Jakarta Charter, which concluded in the deletion of seven terms, *with the obligation to carry out the shari'ah Islam for its adherents*, of first of the five national principles. Pancasila was then agreed upon and established on 18 August 1945.

In the progress, he is considered to have given much contribution in making Pancasila Islamic that most of Indonesian Muslims accept the national foundation. The principles of Pancasila as the national philosophy must be enlightened all the way by the principle of One God, which also means *tawheed* in Islam.

Nevertheless, exhausted ideological-political arguments continued during the 1950 Constituent Assembly. The democratic debates then halted when the famous Presidential Decree was issued on 5 July 1959 ended up in the Soekarno's Guided Democracy (1959-1965) to which Hatta indeed was very critical for he found democracy was not a force from above. He initiated *Demokrasi Kita (Our Democracy)* in 1960 was even banned.

In 1967, he resolved to found Indonesian Islamic Democratic Party (PDII). In his thought, the reason why he wanted to do this was a historical factor which in the progress it was cancelled for no permission from the New Order.

All of his life, Hatta had always made efforts to raise democracy in the country. The guiding democratic ideals and spirit are not only the freedom of the nation but also one, sovereign, fair, and prosperous Indonesia.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Tinjauan Kepustakaan	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LATAR BELAKANG DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK HATTA	20
A. Pengaruh Kultur dan Lingkungan Sosial Minangkabau terhadap Dinamika Perkembangan Intelektual Hatta	20
B. Pengaruh Keislaman dalam Corak Pemikiran Hatta	35
C. Studi Hatta di Belanda dan Pengaruh Barat dalam Sosialisasi Ide-ide Demokrasi	43
D. Hatta dan Dasar-dasar Pemikiran Pergerakan Kemerdekaan.....	58
E. Dinamika Politik Hatta dalam Perjuangan Kemerdekaan di Tanah Air	74
BAB III PEMIKIRAN HATTA TENTANG ISLAM DAN MASALAH KENEGARAAN	83
A. Islam dan Prinsip-prinsip Politik Kenegaraan.....	83
B. Islam dan Nasionalisme	98
C. Islam dan Sosialisme	117
D. Islam dan Perdamaian	129
E. Islam dan Pancasila	133
BAB IV PEMIKIRAN HATTA TENTANG DEMOKRASI	148
A. Konsepsi Demokrasi	148
B. Karakteristik dan Parameter Demokrasi Politik	161
C. Hatta, Demokrasi dan Perkembangan Politik di Indonesia 1945-1966... 169	
1. Pergulatan Pemikiran Politik dan Romantisme Indonesia Merdeka..	171
2. <i>Platform</i> Demokrasi Indonesia, Menuju Demokrasi Konstitusional...178	
3. Dinamika dan Pergolakan Politik di Indonesia	196
BAB V HUBUNGAN ISLAM DAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PEMIKIRAN HATTA.....	214
A. Demokrasi dalam Dinamika Masyarakat Indonesia dan Pengaruh Islam versi Hatta.....	214

1. Kolektivisme dalam Kultur Masyarakat Indonesia.....	215
2. Dinamisasi Islam dalam Kehidupan Masyarakat.....	225
3. Paham Demokrasi Barat.....	239
B. Hatta, Toleransi Politik dan Piagam Jakarta	247
C. Hatta, Islam, dan Demokratisasi Politik di Indonesia: Dinamika Politik Periode Pascarevolusi	262
D. Gagasan Pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia dan Respon terhadap Situasi Politik	273
E. Integritas Kepribadian Bung Hatta.....	280
 BAB VI PENUTUP	 288
A. Kesimpulan	288
B. Saran-saran	300
 LAMPIRAN	 302
DAFTAR PUSTAKA.....	345
BIODATA PENULIS	355

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam dinamika politik di Indonesia, Hatta tampak sebagai seorang tokoh nasionalis yang sekuler. Pengidentifikasian para tokoh politik Indonesia menjadi nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, antara lain, bertolak dari ciri partai tempat tokoh tersebut aktif dan berjuang dalam pergerakan kebangsaan. Hatta memang aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia dan PNI-Baru, yang bercorak nasionalisme.

Meski dalam politik Hatta dikategorikan sebagai seorang nasionalis, namun sikap religius dan nafas budaya tampak mencuat dalam berbagai pemikirannya. Dalam keyakinannya, nasionalisme yang disikapinya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam politik, kuat keyakinan Hatta, begitu juga dengan agama. Segenap sikap, perbuatan, dan tindakannya baik secara pribadi dan sebagai seorang anggota masyarakat yang sadar politik, tidak menolak ajaran agama. Baginya, masyarakat justru harus beragama. Meski Hatta tidak bergerak atas nama Islam, dalam agama ia tetap taat, dan Masyumi tidak pernah menyesali Hatta dalam politik.

Hatta terlihat sebagai pribadi yang unik dan menarik. Hatta bergerak sebagai nasionalis, tetapi sekaligus Muslim yang taat. Bagi Hatta, nasionalis adalah suatu hal yang wajar dalam hidup manusia yang ditentukan Allah. Hatta

memandang Islam dalam hubungan dengan negara secara substantif, bukan simbolik. Islam dalam ajaran kemasyarakatan mementingkan nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebenaran. Ini harus mengejawantah dan memberi isi dalam negara Pancasila yang didirikan.

Latar belakang sebagai orang Minangkabau yang pernah ditempa dalam pendidikan surau menjadi basis dalam napak tilas kehidupan spiritualnya. Hatta adalah turunan seorang ulama yang terkenal, yakni Datuk Syaikh Abd al-Rahman, yang memimpin Surau Batuhampar yang pada masa itu sangat memikat dan terkenal sebagai pusat pendidikan agama Islam di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sejak usia dini, Hatta melewati waktu-waktu singkat di surau Batu Hampar, di mana pamannya yang tertua Syaikh Haji Arsyad, menjabat sebagai pemimpin setelah kakek Hatta Datuk Syaikh Abd al-Rahman meninggal. Pengajaran agama sebagai bekal hidup Hatta sedari dini sudah diperhatikan dalam keluarga ini.

Syaikh Muhammad Djamil Djambek merupakan guru spritual Hatta, yang membimbing langkahnya yang pertama ke jalan pengetahuan Islam. Mengaji al-Qur'an sampai khatam dan menanamkan pemahaman tentang ajaran Islam—yang meliputi antara lain bidang nahwu, fiqh, dan tafsir—diperoleh Hatta dari bimbingan beliau. Bagi Syaikh Muhammad Djamil Djambek, umat Islam perlu dimotivasi untuk belajar ke Barat, supaya mampu melawan tantangan dominasi Eropa, terutama yang menyangkut bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau termasuk salah seorang pelopor gerakan pembaruan Islam di Minangkabau. Di samping itu, pengetahuan agama banyak ditimba Hatta dari H. Abdullah Ahmad, terutama setelah belajar di MULO, ketika ia sudah aktif dalam JSB (*Jong*

Sumatranen Bond, Perkumpulan Pemuda Sumatera). H. Abdullah Ahmad adalah seorang tokoh pendidikan Islam terkemuka yang getol memperjuangkan agar tidak ada dikhotomi antara pendidikan agama dan umum.

Maka sungguhpun Hatta menimba ilmu di Rotterdam, Belanda dan bergaul dengan segala macam orang dan pemikiran, dari yang konservatif sampai kepada yang Marxis, Hatta tak lupa bersikap dan berbuat sebagai hamba Allah yang taat. Ibadahnya tak tinggal dan kawan-kawannya memujinya karena integritas moralnya. Sewaktu studi di negeri Belanda ini, Hatta cukup dekat dan tidak pernah merasa asing dengan kalangan Islam. Pada masa itu, Hatta bahkan menjadi staf luar negeri *Bintang Islam*, sebuah majalah yang penerbitannya diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Muhammadiyah dan Partai Syarikat Islam.

Pada bulan April 1945 Hatta dipercaya untuk memimpin Sekolah Tinggi Islam (STI), yang mulanya didirikan di Jakarta, tetapi dengan berkobarnya revolusi, sekolah ini ditutup dan baru dibuka kembali pada bulan April 1946 di Yogyakarta, yang dalam perkembangannya kemudian menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Hatta tidak lagi memimpin STI di Yogyakarta, tetapi ide-idenya tentang STI 1945 ditransformasikannya untuk STI di Yogyakarta. Bagi Hatta, menyempurnakan pendidikan agama adalah satu hal yang amat penting untuk memperkuat kedudukan masyarakat. Sewaktu pembukaan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta ini pada tanggal 10 April 1946, Hatta menyatakan pandangannya bahwa Islam merupakan salah satu tiang daripada kebudayaan

bangsa dan sebagai “pelita yang sebaik-baiknya untuk menyulahi jalan rakyat ke dalam persaudaraan dan tolong-menolong.”

Dalam dinamika politik di Indonesia Hatta dengan gigih memperjuangkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam pandangan Hatta, “Suatu sistem demokrasi yang sempurna ialah memerintah dari bawah. Rakyat harus bisa merasa bahwa mereka memerintah diri-sendiri.” Perjuangan Hatta bagi tegaknya kedaulatan rakyat (demokrasi) diyakininya sebagai suatu tugas mulia yang sesuai dengan agamanya.

Paham kedaulatan rakyat dan demokrasi sosial menurut Hatta, bersumber pada tiga hal yang memberi inspirasi bagi para pemimpin Indonesia kala itu. *Pertama*, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme, yang tercermin dari masyarakat desa, berupa gotong-royong dan asas kekeluargaan. Demokrasi dalam masyarakat asli Indonesia dilandaskan pada kepemilikan bersama atas tanah dan alat-alat produksi, yang pada dasarnya merupakan masyarakat kolektifis.

Kedua, ajaran Islam yang membela kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. Dalam perspektif syari’at Islam, terlihat betapa urgennya nilai-nilai persamaan (*equality before the law*), persaudaraan, perikemanusiaan, dan perikeadilan, serta kerjasama dalam tolong-menolong. Pada dasarnya nilai-nilai ini harus disosialisasikan dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita Islam.

Islam memperkuat demokrasi dengan membawakan argumentasinya sendiri. Dalam *siyasaḥ syar'iyah* dikenal adanya konsep-konsep *syura* (konsultasi), musyawarah (perundingan), dan *musawah* (kesetaraan) yang bukan hanya cocok dengan demokrasi, bahkan jika diinterpretasikan secara *inherent* sudah mengandung sebetulnya demokrasi.

Bila ditelaah dalam al-Qur'an, versi Hatta, betapa urgennya musyawarah dan sesungguhnya juga telah tertanam dasar pemerintahan demokrasi. Cara atau sistem dalam konteks pelaksanaan pemerintahan demokrasi secara praktis diserahkan kepada manusia yang berakal, akal yang diperolehnya sebagai anugerah Ilahi.

Rancang bangun demokrasi di Indonesia yang demikian, dalam keyakinan Hatta, "tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya." Apalagi perkembangan demokrasi di Indonesia tersebut mengkultur dalam nuansa keindonesiaan, yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai agama, seperti kemerdekaan Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa ridho dan berkat rahmat Allah yang Mahakuasa. Dasar yang paling tinggi ini sangat penting sebagai bimbingan untuk melaksanakan kewajiban moral mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dalam hal ini, relevansi cita-cita demokrasi Hatta dengan agama yang dipeluknya mencuat. Islam dan demokrasi pada esensinya *compatible* dan dapat *viable*.

Ketiga, paham demokrasi sosial Barat yang mengandung dan menjunjung tinggi dasar-dasar perikemanusiaan. Hatta berdomisili di Belanda semasa kuliah, yang banyak mempelajari keberhasilan *Fabian Society* di Inggris, sebagai

laboratorium pengolahan masalah-masalah kemasyarakatan. Selain itu, Hatta juga mempelajari koperasi di Skandinavia. Atas dasar ini, Hatta menilai pelaksanaan demokrasi sosial di Indonesia dapat dipicu dengan perkembangan gerakan koperasi.

Ide-ide Hatta tentang koperasi dan sosialisme ini mencuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi, bagi Hatta, bukan hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, yang dengan sifatnya diharapkan dapat menambah tegaknya demokrasi di Indonesia. Makin banyak berkembang koperasi di berbagai daerah di Indonesia, makin demokratis masyarakat tersebut.

Mengenai hubungan ideologis dan politis antara Islam dan negara, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, perdebatan-perdebatan sengit terjadi dalam berbagai pertemuan Dewan Penasehat (*Sanyo Kaigi*) dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* [BPUPKI]). Dalam berbagai pertemuan di Dewan Penasehat, sejak Februari hingga April 1945, perdebatan itu berlangsung cukup sengit, yang menimbulkan polarisasi, yakni pemisahan kelompok ideologi. Ketika itu Hatta mengulas persoalan ini dengan menegaskan bahwa al-Qur'an tidak bisa sepenuhnya dijadikan landasan hukum negara, karena al-Qur'an bukan kitab hukum dan ilmu politik, tetapi dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam terdapat seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku dalam pergaulan hidup manusia.

Dalam pandangan Hatta, kebangsaan seperti yang ia cita-citakan tidaklah bertentangan dengan Islam, sebagai agama yang dipeluknya. Buktinya, ia adalah

seorang Muslim yang taat dan sekaligus berpaham kebangsaan. Hatta hidup sebagai seorang Muslim yang baik dan baginya negara mesti dipengaruhi dengan tindakan yang baik, karena dalam Islam betapa ditekankan perlu tegaknya keadilan, persamaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Penilaian ini kemudian bisa ditanggapi, karena bagi sebagian orang, agama adalah urusan pribadi dan soal kemasyarakatan seperti masalah kebangsaan sebagai urusan yang terpisah.

Meskipun demikian, dalam pandangan Hatta, masyarakat harus beragama, karena landasannya baik. Soal agama sebagai urusan pribadi dan negara urusan publik, Hatta tidak pernah menyatakannya. Tetapi, dalam pendapatnya, bagi negeri yang warganya plural dan heterogen, berlain-lain agama, tidak lagi relevan pemerintahnya berdasar agama, seperti pendapatnya mengenai pertentangan dalam masyarakat India pada tahun 1931.

Ketika masih studi di Belanda, pada tahun 1931 tersebut Hatta sedari awal telah mengemukakan pemikirannya dalam *Daulat Ra'jat*, yang mengulas tentang Konferensi Meja Bundar antara Inggris dan kaum nasionalis India. Menurut Hatta, Partai Kongres India merupakan wakil daripada seluruh rakyat India, sedangkan *Indian Muslim League* (Partai Persatuan Muslim India) tidak boleh lupa melihat pada keislamannya.

Pemerintah mesti berdasar program politik, yang mengayomi dan berdiri di atas semua golongan, dan mesti dengan dasar “demokrasi”, yakni dengan maksud melindungi keselamatan rakyat dan meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan rakyat banyak. Negara menjamin kemerdekaan beragama dan

melaksanakan peribadatannya masing-masing, tetapi urusan agama adalah soal umatnya masing-masing, sedangkan urusan negara merupakan kerja pemerintah.

Beberapa pemikiran di atas terlihat Hatta ketika itu cenderung membedakan urusan agama dengan soal negara. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa agama tidak penting, tetapi soal agama tidak menjadi urusan hidup bernegara. Karena, menurut Hatta, jika masalah-masalah keagamaan juga ditangani negara, maka agama akan menjadi perkara negara dan sifat keabadiannya akan hilang.

Hatta dipandang sangat berjasa dalam upaya meng-“islamisasi” Pancasila, sehingga dasar negara ini dapat diterima oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara, pada mulanya diawali dengan kelahiran Piagam Jakarta, yang kemudian tujuh patah kata dalam sila pertamanya dihapus, yakni: *dengan kewajiban melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*.

Perdebatan kelompok Islam politik dengan kalangan nasionalis bergulir terus pada Piagam Jakarta. Resolusi konflik ideologis kemudian diretas oleh Hatta, sebagai suatu upaya menjamin persatuan bangsa dalam masa-masa gawat dan sulit yang dihadapi dan menghindarkan adanya sesuatu dalam konstitusi yang menabur benih perpecahan. Perubahan-perubahan dalam Piagam Jakarta dapat diterima karena toleransi kelompok Islam yang sangat kuat komitmennya terhadap kesatuan bangsa dan bahkan dalam semangat nasionalisme demi keutuhan negara Republik Indonesia. Kelompok Islam dapat menerima

permintaan Hatta tersebut, dengan berharap kemudian akan membicarakan kembali masalah ideologis melalui jalan yang demokratis.

Hatta mengambil sikap dan tindakan demikian karena beberapa alasan. *Pertama*, bahwa persatuan dan kesatuan nasional sangat penting, sehingga Hatta tidak menginginkan Indonesia pecah dan bercerai-berai lagi, sebagaimana dalam masa pemerintahan kolonial. *Kedua*, Indonesia merdeka yang baru diproklamirkan mesti dipertahankan dengan berbagai daya-upaya dan kekuatan, dan segala yang membawa kepada pertikaian mesti dihilangkan. *Ketiga*, dalam pandangan Hatta, bagi negara yang warganya heterogen dan plural, dengan agama yang berlainan, negara mesti di-dekonfessionalisasi, yang didirikan di atas persatuan dan kesatuan nasional yang melindungi dan mengayomi seluruh warga negara, sebagaimana pendapatnya ini dikemukakan pada tahun 1931 mengenai situasi di India.

Pengakuan di muka Tuhan dalam paham kebangsaan Hatta mengacu pada Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus selalu disinari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan orang Islam, Esa tersebut menunjukkan dengan makna *tauhid*.

Dalam Islam, versi Hatta, terkandung ajaran kemasyarakatan, yang mementingkan tegaknya keadilan, persamaan dan kebenaran. Pada tahun 1940 Hatta sudah menguraikan pemikirannya tentang sosialisme. Hatta berpendapat bahwa dalam Islam, jika dipikirkan secara konsekwen, mutlak menuju ke sosialisme, karena dalam Islam ditekankan betapa pentingnya persaudaraan umat manusia dan tegaknya keadilan.

Perhatian Hatta begitu tinggi terhadap sosialisme, terutama karena sejak usia muda Hatta telah dipengaruhi oleh unsur-unsur sosialis. Kedekatannya dengan tokoh-tokoh Sarekat Islam, seperti H. Agus Salim (1889-1954), memperkaya pemahamannya terhadap pentingnya sosialisme dalam Islam. Pada tahun 1940 Hatta sudah menulis hubungan antara sosialisme dan Islam ini.

Di hadapan civitas akademika Universitas Sun Yat Sen di Kanton, Republik Rakyat Cina pada 11 Oktober 1957, Hatta menegaskan pemikirannya bahwa sosialisme Indonesia selain berdasarkan paham sosialis Barat, juga berasal dari ajaran agama dan corak kolektif masyarakat Indonesia sendiri.

Paham sosialis tampak menonjol dalam pemikiran Hatta, sehingga dalam aktifitas ekonomi dengan motivasi laba dalam mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara yang menimbulkan eksploitasi atas manusia tidak dapat ditolerir karena tidak sesuai dengan asas keadilan sosial dan persamaan di antara manusia serta demi pengabdian diri kepada Allah SWT.

Dalam aspek ekonomi ini, Hatta dengan gigih memperjuangkan ditegakkannya sosialisme di Indonesia. Implementasi gagasan tersebut, seperti tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun konsep mengenai *welfare policy* dan kebijakan *affirmative action* dirumuskan pula dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berkenaan dengan ketentuan tentang fakir-miskin dan anak terlantar diharuskan dipelihara oleh negara. Ini merupakan pelaksanaan keadilan sosial, karena dalam sosialisme tidak ada kemiskinan hidup. Hal ini sesuai dengan dasar Islam, yang menghendaki agar masyarakat

melaksanakan keadilan dan kemakmuran. Itulah sebabnya sosialisme di Indonesia yang dimaksudkan Hatta adalah sosialisme religius.

Gagasan tentang masyarakat yang harmonis dan penuh rasa kemanusiaan ini, yang hendak diwujudkan Hatta dengan Partai Demokrasi Islam Indonesia pada tahun 1967. Dalam pemikiran Hatta, keinginannya untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia adalah faktor sejarah. Hatta bukan ingin terjun langsung untuk terlibat aktif di dalam partai politik, tetapi dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik bagi generasi muda. Gerakan pemuda Islam yang sudah berorientasi kepada suatu partai Islam yang ada, tentu akan menentukan posisi dalam induk partainya. Oleh karena itu, Hatta ingin merekrut kalangan tokoh-tokoh muda terutama yang dulu aktif di PII dan HMI.

Hatta memilih golongan muda Islam ini untuk turut aktif dalam Partai Demokrasi Islam Indonesia didasarkan pada beberapa pemikiran *Pertama*, sebagai sarana pendidikan politik dan proses kaderisasi. Dalam jangka panjang proses kaderisasi tentu akan berlanjut dan akan membawa kemaslahatan bagi rakyat banyak, dan bagi Indonesia rakyat banyak itu sebenarnya menganut Islam.

Kedua, situasi politik yang ia saksikan sendiri secara langsung, yang banyak dipenuhi kepentingan diri dan golongan yang tidak mengacu lagi pada perwujudan kolektivisme demi kebaikan rakyat. Hatta kecewa besar, karena ia menyaksikan sendiri pada era Demokrasi Terpimpin begitu banyak kalangan nasionalis yang menyokong Soekarno tanpa dilandasi oleh idealisme bagi kebaikan bangsa dan malah bekerjasama dengan PKI.

Ketiga, Hatta melihat pula kalangan muda yang sosialis, tetapi tidak merakyat, sehingga meskipun Hatta dalam banyak hal dapat sejalan dengan mereka dalam paham masyarakat dan negara, tidak merasa akan banyak hasilnya jika bergerak bersama-sama mereka. Pilihan yang tepat bagi Hatta, baik dari segi paham maupun golongan adalah kalangan aktivis Islam yang muda-muda, sehingga ia mengharapkan kemudian ada proses kaderisasi dan sarana pendidikan politik yang berimplikasi bagi kebaikan rakyat banyak.

Kesepakatan itu kemudian bergulir dengan rencana pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Kesepakatan dicapai bahwa partai “berjiwa Islam dan bersifat nasional, berjuang atas dasar Pancasila” (Pasal 2 Anggaran Dasar PDII). Yang akan diperjuangkan dalam PDII adalah cita-cita Islam dalam bermasyarakat, tegaknya demokrasi dan sosialisme dengan jiwa Islam dan bersifat nasional. Paham kemasyarakatan Islam memang menghendaki tegaknya demokrasi dan sosialisme, dan di negara Republik Indonesia dasar-dasarnya telah dicantumkan dalam UUD 1945, serta semangat yang terkandung di dalamnya, meski dalam UUD tidak secara eksplisit menyebut nama Islam.

Sosialisasi gagasan pendirian partai ini ternyata mendapat sambutan yang bagus dari Padang dan Ujung Pandang. Dalam prosesnya kemudian, Hatta mengirim surat kepada Presiden Soeharto tanggal 11 Januari 1967 menyampaikan keinginannya untuk mendirikan partai tersebut, tetapi pemerintah Orde Baru tidak mengizinkannya. Pendirian PDII kemudian menjadi terkendala dan gagal.

Perjuangan dan kesungguhan Hatta dalam penyemaian nilai-nilai demokrasi di Indonesia begitu mulia. Semboyan perjuangan Hatta untuk

memperkuat rasa kebangsaan dan semangat demokrasi adalah: “Indonesia benar-benar merdeka, bersatu dan tidak terpisah-pisah, serta berjuang atas kekuatan tenaga sendiri.”

B. Saran-saran

Dewasa ini demokrasi memang menjadi standar fundamental dari suatu legitimasi politik. Masyarakat tengah hidup di abad demokrasi atau memang sedang berproses menuju demokratisasi. Demokrasi dan demokratisasi adalah hal yang sangat didambakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Suatu negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi, yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Hatta, perkembangan demokrasi di Indonesia mengkultur dalam nuansa keindonesiaan, yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai agama, seperti kemerdekaan Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa ridho dan berkat rahmat Allah yang Mahakuasa. Oleh karena itu, sebagai suatu penelitian agar dieksplorasi lebih lanjut, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

Pertama, Agar gagasan seputar hubungan Islam dan masalah kebangsaan dalam upaya demokratisasi politik di Indonesia bergulir sesuai dengan kemaslahatan rakyat, maka perlu kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama pendidikan tinggi, untuk menggalakkan pengkajian-pengkajian atau penelitian yang berorientasi untuk menggali dan merumuskan langkah-langkah strategik bagi sosialisasi pemikiran seputar teorisasi politik Islam dalam dinamisasi umat Islam Indonesia secara seksama, termasuk gagasan Hatta sebagai

salah seorang tokoh proklamator yang dikenal alim dan taat dalam kehidupan religiusitas.

Kedua, esai-esai dan sekelumit pemikiran Hatta tentang Islam dan demokrasi tidak dimuat dalam satu buku, tetapi banyak tertuang dalam berbagai karyanya, dianjurkan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya untuk menggalakkan penelitian-penelitian atau kajian yang berkaitan dengan pemikiran ahli politik dan sosok negarawan Islam di Indonesia ini, atau kajian yang progresif tentang para ahli dalam ilmu-ilmu sosial lain yang relevan dengan topik dimaksud.

Ketiga, menumbuhkan sikap apresiatif dan menghilangkan sikap apriori terhadap pemikiran-pemikiran Hatta dalam berbagai aspek perlu dilakukan oleh para akademisi Islam dengan menggalakkan kajian-kajian seputar pergumulan Islam, paham kebangsaan, dan demokrasi dalam konstelasi politik di Indonesia. Hal ini juga akan melahirkan semangat ilmiah dan kritis terhadap perkembangan dan pencerahan pemikiran politik Islam di Indonesia. Seterusnya, kepada para peneliti atau penulis selanjutnya agar membahasnya lebih sempurna lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- _____, “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern”, *Tashwirul Afkar*, No. 7, 2000.
- Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)*, Monograph Series. Ithaca-New York: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1971.
- _____, “Dekrit Presiden, Revolusi dan Kepribadian Nasional”, *Kompas*, 1 Juni 2001.
- Alam, Wawan Tunggul, *Demi Bangsa, Demi Pertentangan Sukarno vs Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- _____, dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Almond, Gabriel A. dan G. Bingham Powell, Jr. *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company, 1966.
- Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, Iwan Kusuma Hamdan dan Retno Pujiastuti (peny.), dari Disertasi, “Masalah Pengisian Jabatan Presiden: Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993”. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, 1999.
- Alwi, Des, “Bersama Hatta dan Sjahrir”, Rikard Bagun (ed.), *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasional Islam dan Nasional “Sekuler” tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Apter, David E., *The Politics of Modernization*. Chicago: The University of Chicago Press, 1965. Alih bahasa Hermawan Sulistyono dan Wardah Hafidz, *Politik Modernisasi*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Arief, Sritua, *Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-A'mal al-Kamilah, Al-Qanun wa Audha'una al-Siyasah*. Kairo : Al Mukhtar al- Islamy, 1994.
- Audi, Robert (ed.), “The Socialism” dalam *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Azra, Azyumardi, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- _____, "Membangun Keadaban Demokratis, Ke Arah Budaya Politik Baru Indonesia", *Kompas*, 28 Juni 2000.
- _____, "Antara Kesetiaan dan Perbenturan : Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Indonesia dan Malaysia", Edy A.Effendy (ed.), *Dekonstruksi Islam, Mazhab Ciputat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- _____, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan*. Bandung: Rosdakarya, 1999.
- _____, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- _____, and Arskal Salim (ed.), "Introduction, The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics," dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- _____, "Kata Pengantar: Kompatibilitas Islam dan Demokrasi", Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- _____, *Menggapai Solidaritas: Tensi antara Demokrasi, Fundamentalisme dan Humanisme*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- Bagun, Rikard (ed.), *Seratus Tahun Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Balitbang Dikbud, *Pangkalan Data, Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Bagian Perencanaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, 1996.
- Ball, John, *Indonesian Legal History 1602-1848*. Australia: Macarthur Press Books Pty Ltd., 1982.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*. New York: W. van Hoeve Ltd., The Hague and Bandung, Institute of Pacific Relations, 1958.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia, An Anthropology of Public Reasoning*. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat, 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*, M. Syafi'i Anwar, dkk (peny.). Bandung: Mizan dan Majalah Ummat, 1998.
- Cohen, Bernard P., *Developing Sociological Knowledge, Theory and Method*, London: Prentice Hal Inc., 1980.
- Dahl, Robert A., *Democracy and Its Critics*. New Haven dan London: Connecticut, Yale University Press, 1989.
- _____, *Dilemma of Pluralist Democracy*. New Haven dan London: Connecticut, Yale University Press, 1982.
- Dijk, Kees Van, *A Country in Despair, Indonesia Between 1997 and 2000*. Leiden: KITLV Press, 2001.
- Edwards, Paul (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, vol.7-8. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.

- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, *(Re-)Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____, "Pengantar: Disartikulasi Pemikiran Politik Islam," Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik*, terj. Harimurti dan Qamaruddin SF. Jakarta: Serambi, 1996.
- _____, "Masa Depan Civil Society di Indonesia: Memeriksa Akar Sosio-Religius", *Tashwirul Afkar*, No. 7, 2000.
- Emerson, Rupert, "The Erosion of Democracy", *The Journal of Asian Studies*, Vol. XX, No.1, November 1960, dalam Alvin Z. Rubinstein dan Garold W.Thumm (ed.), *The Challenge of Politics, Ideas and Issues*. Toronto: Prentice-Hall of Canada Ltd., 1965.
- Enayat, Hamid, "Nationalism, Democracy, and Socialism", Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought*. Austin-Texas: University of Texas Press, 1982.
- Esposito, John L., and John O. Voll, *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press, 1996.
- _____, (ed.), *Islam in Asia, Religion, Politics, and Society*. New York-Oxford: Oxford University Press, 1987.
- _____, *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. New York: Oxford University Press, 1992, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, *Ancaman Islam, Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan, 1996.
- Esten, Mursal, *Minangkabau: Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Al-Nizham al-Siyasi fi Al-Islam*. Yordania: Darul Furqan, 1986.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca-New York: Cornell University Press, 1962.
- Flechtheim, Ossip K., *Fundamentals of Political Science*. New York: Ronald Press Co., 1952
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Gellner, Ernest, *Muslim Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Guibernau, Montserrat, *Nationalisms, The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir, *Ushul al-Fikr al-Siyasi fi al-Qur'an al-Makki*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Harjono, Anwar, dan Lukman Hakiem, *Di Sekitar Lahirnya Republik, Bakti Sekolah Tinggi Islam dan Balai Muslimin Indonesia Kepada Bangsa*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1997.
- Hatta, Mohammad, *Islam, Society, Democracy and Peace*. New Delhi: Information Service Indonesia, Embassy of the Republic of Indonesia, 1955.
- _____, *Ilmu dan Agama*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.

- _____, *Islam, Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian*. Jakarta: Tintamas, 1957.
- _____, “Islam dan Pembangunan Masyarakat”, *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- _____, “Islam dan Masyarakat”, Makalah yang disampaikan di depan civitas akademika Universitas Islam Aligar, India, 29 Oktober 1955. *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- _____, “Sifat Sekolah Tinggi Islam”, dalam Anwar Harjono dan Lukman Hakiem, *Di Sekitar Lahirnya Republik*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1997.
- _____, “Jiwa Islam dalam Membangun Negara dan Masyarakat”, Pidato pada pertemuan KAMI, Bogor, 25 Juni 1966.
- _____, “Persiapan Diri Menjadi Pembangun Masyarakat Berkeadilan Ilahi”, Pidato di depan Mukhtar IX Pelajar Islam Indonesia di Medan, 17 Juli 1962.
- _____, *Memoir*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- _____, “Dakwah dan Pembangunan”, Sambutan tertulis pada Mubes II IMMIM (Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia Makasar) se-Sulawesi dan Maluku, 19 April 1972, *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- _____, “Khotbah Hari Raya”, khutbah Idul Fitri di Bukittinggi, 18 Agustus 1947, *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- _____, *Bung Hatta's Answers*, Interviews with Z. Yasni. Singapura: Gunung Agung, 1981.
- _____, *Portrait of a Patriot, Selected Writings by Mohammad Hatta*, Netherlands: Mouton and Co., 1972.
- _____, *Indonesian Patriot, Memoirs*, edited by C.L.M. Penders. Singapura: Gunung Agung, 1981.
- _____, *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, t.t.
- _____, *Kedaulatan Rakyat*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- _____, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Sri-Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (ed). Jakarta: UI Press, 1992.
- _____, dalam *Daulat Ra'jat, Buku I Tahun 1931-1932*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
- _____, dalam *Daulat Ra'jat, Buku II Tahun 1933-1934*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
- _____, dan Anak Agung, *Surat-Menyurat Hatta dan Anak Agung: Menjunjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Dikatur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- _____, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Jakarta, Tintamas, 1982.
- _____, *Pantjasila Djalas Lurus*. Bandung: Angkasa, 1966
- _____, *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- _____, *Menuju Negara Hukum*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- _____, *Lampau dan Datang*. Djakarta: Djembatan, 1956
- _____, *Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.

- _____, *Nama Indonesia (Penemuan Komunis ?)*, terj. Gayus Siagian. Jakarta: Yayasan Idayu, 1980.
- _____, *Mendayung Antara Dua Karang*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____, *Permulaan Pergerakan Nasional*. Jakarta: Idayu Press, 1977.
- _____, *Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk., 2002.
- _____, *Kumpulan Pidato (dari Tahun 1942 s/d 1949)*, peny. I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- _____, *Kumpulan Pidato II, (dari Tahun 1951 s/d 1979)*, peny. I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono. Jakarta: Inti Idayu Press, 1983.
- _____, *Kumpulan Pidato III*, peny. I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- _____, *Kumpulan Karangan Hatta*, Buku I. Jakarta: LP3ES, 1998
- _____, *Kemerdekaan dan Demokrasi*, Buku II. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.
- _____, *Karya Lengkap Bung Hatta, Buku I, II, dan III*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- _____, *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- _____, *Ke Arah Indonesia Merdeka*. Jakarta: Dekopin, 1994.
- _____, *Peranan Pemuda Menuju Indonesia Merdeka, Indonesia Adil dan Makmur*. Bandung: Angkasa, 1966.
- _____, *Sebuah Bibliografi, Memuat Daftar Karya Oleh dan Tentang Bung Hatta*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1988.
- Hayes, Carlton J.H, *Essay on Nationalism*. New York: The Macmillan Company, 1926.
- Heller, Francis, *The Presidency a Modern Perspective*. New York: Random House, Inc, 1960.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, "Peran Sosial Agama", *Kompas*, 28 Juni 2000.
- _____, dan Ahmad Gaus AF (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Hook, Sidney, "Democracy", Bernard S. Cayne, et.al. (ed.), *The Encyclopedia Americana, International Edition*, Vol. 8. New York: Americana Cooperation International Headquarters, 1972.
- Husaini, S. Waqar Ahmed. *Islamic Evironmental System Engineering*. London : The Macmillan Press, 1980
- Ibn Taimiyah, Taqy al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Maroko: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1991.
- I. Doi, Abdur Rahman, *Syari'ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur, Malaysia: AS. Noordeen, 1989.
- J.A., Denny, "Islam, Negara Sekuler, dan Demokrasi", Saripudin HA (ed.), *Negara Sekuler, Sebuah Polemik*. Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, 2000.
- Kahfi, Erni Haryanti, *Islam and Nationalism, Agus Salim and Nationalist Movement in Indonesia During the Early Twentieth Century*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952.
- Kartodirjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia, 1990.
- Khan, Qamaruddin, *Political Concepts in the Quran*, Lahore: Islamic Book Foundation, 1982.
- Kurzman, Charles, (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook*, (Oxford: Oxford University Press, 1998), terj. Bahrul Ulum, dkk., *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Latif, Yudi, *Masa Lalu yang Membunuh Masa Depan: Krisis Agama, Pengetahuan, dan Kekuasaan dalam Kebudayaan Teknokratis*. Bandung: Mizan, 1999.
- _____, "Watak Tiranik Pemuja Demokrasi", *Republika*, 31 Maret 1995.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts in Indonesia: A Study in the Political Bases of Legal Institution*. Los Angeles, London: University of California Press, 1972.
- Lewis, Bernard, *The Political Language of Islam*. London: The University of Chicago Press, 1988.
- Liddle, R. William, "Langkah-langkah Baru Demokratisasi di Indonesia", dalam Valina Singka Subekti, dkk., *Memastikan Arah Baru Demokrasi*. Bandung: Mizan, 2000.
- _____, "Masa Lalu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia", dalam *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, terj. Nung Katjasungkana. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3S, 1985.
- _____, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemandirian, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- _____, *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- _____, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial-Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- _____, dan Mohamad Roem, *Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid dan Mohamad Roem*. Agus Edi Santoso (peny.). Jakarta: Djambatan, 1997.
- _____, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- _____, "Hak-hak Asasi Universal dan Semangat Keagamaan", *Republika*, 24 Maret 1995.
- _____, "Pengantar: Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi, Tantangan dan Kemungkinan," Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

- _____, "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", Mun'im A. Sirry (ed.), *Islam Liberalisme Demokrasi, Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- _____, dkk, *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, M.Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.). Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan)*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- _____, "Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum, Otoriter dan Konservatif", *Prisma*, No.7, Juli 1995.
- Mahmassani, Subhi, *Arkan Huquq al-Insan*. Alih bahasa Hasanuddin, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern*. Jakarta: Tintamas Indonesia dan Litera AntarNusa, 1993.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Universitas Islam Negeri Indonesia dan Gama Media, 1999.
- Marx, Karl dan Friedrich Engels, "The Class Basis of Political Power", *The Communist Manifesto*, Alvin Z. Rubinstein dan Garold W.Thumm (ed.), *The Challenge of Politics, Ideas and Issues*. Toronto: Prentice-Hall of Canada Ltd., 1965.
- Moerdiono, dkk., *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Moten, Abdul Rashid, *Political Science: An Islamic Perspective*, terj. Munir A. Mu'in dan Widyawati, *Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 2001.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Ahkam al-Syakhsiya*. Mesir: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1964.
- Mujani, Saiful, "Islam dalam Hegemoni Teori Modernisasi", Edy A. Effendy (ed.), *Dekonstruksi Islam, Mazhab Ciputat*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1999.
- Naim, Mochtar, "Hatta dan Pembangunan Ekonomi Koperasi di Indonesia", *Republika*, 24 April 1995.
- Nasution, Adnan Buyung, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Utrecht: Rijksuniversiteit, 1992. Alih bahasa Sylvia Tiwon, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Al-Naqawi, Ali Muhammad, *Al-Islam wa al-Qaumiyah*. Teheran-Iran: Rabithah al-Tsaqafah wa al-'Alaqaq al-Islamiyah, 1997.
- _____, *Islam and Nationalism*, translated by Alaedin Pazargadi. Teheran-Iran: Islamic Propagation Organization, 1984.

- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- _____, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- _____, *Mencari Presiden*. Bandung: Alqaprint, 1999.
- Nur, Aminuddin, *Pengantar Studi Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Pembimbing Massa, 1967.
- Potter, Garry, *The Philosophy of Social Science, New Perspectives*. London: Prentice Hall, 1955.
- Prasetyo, Eko, dkk. (ed.), *Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Putnam, Robert D., "Studi Perbandingan Elite Politik", dalam Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. Ke-14. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1999.
- _____, "Pengantar: Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society", Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan The Asia Foundation (TAF), 1999.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1984.
- Rais, M.Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1987.
- Ramage, Douglas, *Politic in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge, 1995.
- Rasjid, S.M., dkk., *Bung Hatta: Mengabdikan pada Tjita-tjita Perdjoangan Bangsa*. Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70, 1972.
- Reese, William L., *Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*. New York: Humanity Books, 1998.
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan, 1981.
- Rose, Mavis, *Indonesia Free, a Political Biography of Mohammad Hatta*, terj. Hermawan Sulistyono, *Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: Gramedia, 1991
- Rosenthal, E.I.J., *Islam in the Modern National State*. Cambridge : Cambridge University Press, 1965.
- Rousseau, Jean Jacques, *The Social Contract and Other Discourses*, translated by G.D.H.Cole. Everyman's Library, 1913.
- Rubinstein, Alvin Z. dan Garold W.Thumm (ed.), *The Challenge of Politics, Ideas and Issues*. Toronto: Prentice Hall of Canada Ltd., 1965.
- Sabine, George, *A History of Political Theory*. New York: Henry Holt and Company, 1954.

- Sartori, Giovanni, *The Theory of Democracy Revisited*, Part One: The Contemporary Debate. New Jersey: Chatham House Publisher, 1987.
- Schwartz, Bernard, *American Constitutional Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1955.
- Silalahi, Saing, *Dasar-dasar Indonesia Merdeka, Versi Para Pendiri Negara*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Sill, David L., (ed.), *International Encyclopaedia of The Social Sciences*. New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1972.
- Simorangkir, J.C.T., dan B. Mang Reng Say, *Around and About The Indonesian Constitution of 1945*. Jakarta: Djambatan, 1980.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- _____, *Panca Azimat Revolusi: Nasakom, Pancasila, Manipol Usdek, Trisakti Tavip, Berdikari*. Jakarta: Totalitas, 2002.
- _____, *Bung Karno dan Wacana Islam*, Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (ed.). Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2001.
- _____, *Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959*, Cet. III, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1959.
- Soemantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sorensen, Georg, *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. San Fransisco: Westview Press, 1993.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam, Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Teraju, 2002.
- _____, "Mohammad Hatta: Tokoh Moralis dalam Gerakan Anti Korupsi", Ahmad Suhelmi, *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Sukma, Rizal, *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge Curzon, 2003.
- Suminto, H. Agib, *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suntharalingam, R. dan Abdul Rahman Haji Ismail (ed.), *Nasionalisme, Suatu Tinjauan Sejarah*. Petaling Jaya: Fajar Bakti SDN BHD, 1985.
- Suny, Ismail, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Surbakti, A.Ramlan, *Reformasi Kekuasaan Presiden*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 1998.
- Swasono, Sri-Edi, (ed.), *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat, Memperingati Satu Abad Bung Hatta*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
- _____, dan Fauzie Ridjal (ed.), *Satu Abad Bung Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tashadi, dkk., *Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Dr.Ir. Soekarno dan K.H.Ahmad Dahlan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999.

- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tolkhah, Imam, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Toynbee, Arnold J., *A Study of History*. London: Oxford University Press, 1960.
- Uhlen, Anders, *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World*. London: Nordic Institute of Asian Studies, Richmond, Curzon Press, 1997.
- Varma, SP., *Modern Political Theory*, terj. Yohanes Kristiarto dkk, *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Vatikiotis, P.J., *Islam and the State*. London: Routledge, 1987.
- Wahjono, Padmo, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- _____, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.
- Widjaja, I. Wangsa, *Mengenang Bung Hatta*. Jakarta : Masagung, 1988.
- Woodward, Mark R., *Toward A New Paradigm: Recent Developments in Indonesian Islamic Thought*. Arizona: Arizona State University, 1996. Alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, *Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Yatim, Badri, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos, 1999.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jilid 1. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.
- Zahrah, M. Abu, "Al-Madzahib al-Siyasah", dalam *Tarikh al-Madzahib al-Islamiah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, t.t.